

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa orde baru dimana segala kegiatan di daerah-daerah diatur oleh pemerintah pusat sebagai kekuasaan tertinggi, terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar. Eksploitasi kekayaan alam di daerah kemudian tidak berbanding lurus dengan optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah tersebut, banyak pembangunan yang terbengkalai dan tidak terurus, dikarenakan pemerintah hanya berfokus pada daerah pusat saja, dampaknya kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah lain menjadi semakin tertinggal. Tidak adanya pembagian wewenang yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah, membuat pemerintah pusat kesulitan untuk memantau kegiatan-kegiatan serta masalah-masalah yang terjadi di daerah.

Adanya masalah tersebut telah mendorong pemerintah pusat untuk merancang pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang diambil pemerintah pusat untuk mengalihkan berbagai macam kewenangan dan kewajiban yang tadinya berada di pemerintah pusat untuk kemudian diserahkan kepada Pemerintah Daerah (PEMDA). Undang-Undang No.32 tahun 2004 (UU No.32/2004) menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan memaksimalkan

tata kelola pemerintahan yang baik sehingga akan berdampak pada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Handra & Maryati, 2009).

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik perlu adanya pengukuran terhadap kinerja pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan salah satu cara yang dapat digunakan pemerintah daerah dalam mencapai pemerintahan yang baik (Halacmi, 2005). Pengukuran kinerja dilakukan dengan melakukan proses *monitoring*, evaluasi secara teratur dan komprehensif, guna mengukur kemajuan tingkat keberhasilan Pemda dalam penerapan prinsip otonomi daerah dan penyelenggaraan urusan pemerintah.

Undang-undang No.32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemda juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Sebagai bukti pertanggungjawaban kinerja Pemda, LPPD merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada publik dan sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik.

Dalam peraturan (PP) Pasal 2 Nomor 3 tahun 2007 tentang LPPD kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan informasi LPPD kepada masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantu dan tugas umum pemerintah. Isi dari LPPD pemerintah daerah kabupaten/kota bergantung pada urusan yang menjadi tanggungjawabnya dan karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah tersebut.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan adanya evaluasi yang disebut dengan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009. Tujuan adanya evaluasi penyelenggaraan pemerintah menurut Gamawan Fauzi yang dikutip oleh Ellu (2010) yaitu untuk mengetahui keberhasilan penyelenggara pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya dan hasil yang dicapai. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan di setiap tahunnya yang nantinya dari hasil evaluasi tersebut dapat diperoleh gambaran hasil kinerja pemerintah daerah, baik di level pengambilan kebijakan maupun di level pelaksanaan kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayanan masyarakat.

Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah antara lain adalah total aset, daerah dengan total aset yang lebih besar akan lebih kompleks dalam mengelola asetnya. Selain itu (Sumardjo, 2010) menambahkan pelayanan yang baik dapat diberikan PEMDA jika didukung dengan aset yang baik pula, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dibutuhkan sumberdaya dan fasilitas memadai. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh daerah maka fasilitas yang diberikan juga semakin baik dan seharusnya kinerja pemerintah daerah semakin baik karena fasilitas yang terpenuhi. Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah Sebagai penopang utama Pendapatan Asli Daerah (Hartoyo 2014).

Pemerintah memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) beragam, salah satunya tergantung dari tingkat kekayaan daerah yang dimilikinya. Tingkat kekayaan daerah menggambarkan pendapatan yang bersumber dari daerah itu

sendiri yang diprosikan dengan PAD yang diperoleh. Pengelolaan sumber daya dan kekayaan daerah secara baik mampu meningkatkan PAD. PEMDA yang memiliki PAD tinggi seharusnya akan lebih bebas dalam memanfaatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran daerah (belanja daerah) yang akan digunakan untuk memenuhi fasilitas daerah tersebut. PAD merupakan cerminan kemandirian suatu daerah dan merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai pemerintahan dan pembangunan di daerahnya. Menurut Setiawan (2011), semakin besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak bergantung kepada bantuan eksternal dari pemerintah pusat.

Bantuan eksternal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) yang di alokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Pemberian dana alokasi khusus (DAK) sendiri diarahkan untuk kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat dengan umur ekonomis yang panjang,

Dana Alokasi Khusus (DAK) di khususkan untuk membantu membiayai kebutuhan pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) sepenuhnya digunakan untuk belanja modal untuk peningkatan fasilitas publik dengan kata lain tidak ada bagian DAK yang digunakan untuk biaya operasional pembangunan seperti biaya perjalanan dinas dan sebagainya. Dana Alokasi khusus

sepenuhnya di pergunakan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Luas wilayah yang dimiliki suatu daerah juga bisa mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya luas wilayah yang dimiliki masing-masing daerah. Daerah dengan wilayah yang luas membutuhkan sarana dan prasarana yang lebih banyak sebagai syarat untuk pelayanan kepada publik bila dibandingkan dengan daerah yang memiliki wilayah yang tidak begitu luas. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih dari pemerintah daerah agar pelayanan publik dapat diberikan secara merata.

Dalam pengukuran kinerja pemerintah diperlukan juga adanya pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah. Salah satu indikator kualitas pendidikan masyarakat adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dalam pengukurannya, kinerja merupakan komponen yang penting sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi.

Luas wilayah dapat mempengaruhi pengalokasian DAK yang diberikan untuk meningkatkan PAD, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka total aset daerah juga semakin besar. Total aset yang besar akan meningkatkan kinerja Pemda untuk memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk membuat penelitian yang berjudul “*Pengaruh Total Aset, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Luas Wilayah, Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kinerja Pemerintah Daerah*”.

Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), dengan variabel yang dipilih adalah variabel Total Aset. Untuk variabel Pendapatan Asli Daerah diambil dari penelitian Barnawi, Y. (2013), variabel Dana Alokasi Khusus diambil dari penelitian Febriansyah, A. (2013), variabel Luas Wilayah diambil dari penelitian Zulfikar (2013), variabel Indeks Pembangunan Manusia diambil dari penelitian Pamungkas, B. (2013), dan variabel Kinerja Pemerintah Daerah diambil dari Sudarsana, H. S. (2013).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah total aset berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
2. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?
4. Apakah luas wilayah berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah?

5. Apakah indeks pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh total aset terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh luas wilayah terhadap kinerja pemerintah daerah.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kinerja pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki kinerja pemerintah daerah sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat terhadap pemerintah dapat terpenuhi.

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan mengenai kinerja pemerintah daerah dan bisa menjadi acuan atau referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serta mengkaji lebih lanjut dalam topik yang sama.